

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press. Yogyakarta, 2009
- Adjie Habieb, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Citraaditya Bakti, 2009
- Alfitra, *"Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia"*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011
- Andi Amzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill Co, 1992
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung, Sumur Bandung, 1981
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1992
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1981
- Mardianto Hasbi, *"Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-Undangan"*, Media Ilmu, Bandung, 2012
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006,
- Rusli Muhammad, *"Hukum Acara Pidana Kotemporer"*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung, Mandar Maju, 1989

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1981)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 8, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

Sutan Rachmat, "*Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*", Pustaka Ilmu, Jakarta, 2009

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

II. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

III. Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Anhar Riadi, "*Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris dalam Proses Peradilan*", Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 2014

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, terdapat dalam Artikel Marisa Maharini, Kewenangan Majelis Pengawas daerah (MPD) memberikan Izin Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Maupun Terdakwa*, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Herman Faisal Siregar, "*Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus di Peradilan Pidana Berkaitan dengan Pemanggilan Notaris*", Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nuzulla Khairani, *Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris atas Protokol Notaris yang diserahkan kepadanya*, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011

Surhatono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011

Widyatmoko, “*Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*”, makalah dalam Seminar Nasional, diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Uiversitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014

IV. Situs Internet:

AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depkuham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

Adrian Djuani, *Kalangan Notaris Sesalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, dimuat pada situs <http://www.antaraneews.com/berita/377492/kalangan-notaris-sesalkan-putusan-mk>

Afipudin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Magister Kenotariatan Universitas Narotama, terdapat dalam situs <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/IMPLIKASI-HUKUM-PROTOKOL-NOTARIS-SEBAGAI-ARSIP-NEGARA.pdf>, (diakses terakhir kali tanggal 12 Juli 2017, jam 10.00)

Diah Sulistyani Muladi, *Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, dimuat pada Suara Karya Tanggal 2 Juli 2013 dan terdapat pada situs <http://budisansblog.blogspot.co.id/2013/07/notaris-pasca-putusan-mk.html>

Hakmi Kurniawan, *Akta Otentik dan Akta dibawah tangan*, terdapat pada situs <http://panglimaw1.blogspot.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>

Irma Devita, *Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Istimewa Notaris*, terdapat pada situs <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>, diakses terakhir kali pada tanggal 10 Juni Jam 08.45 WIB

Jusuf Patriks, *Apakah Notaris Tunduk pada prinsip Equality Before The Law?* Ditemukan dalam situs <http://notarissby.blogspot.co.id/2008/03/apakah-notaris-tunduk-pada-prinsip.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, terdapat dalam situs <http://kbbi.web.id/yuridis> (diakses terakhir kali Tanggal 08 Maret 2017, jam 10.18).

L.M. Ghandi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, ditemukan dalam situs <https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/>

M. Meyati, "*Kajian Yuridis Pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor.30 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No.49/PUU-X/2012) dan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, terdapat dalam situs <https://media.neliti.com/media/publications/14015-ID-kajian-yuridis-pencabutan-pasal-66-ayat-1-uujn-no-30-tahun-2004-oleh-mahkamah-ko.pdf> (terakhir kali dikunjungi pada 8 Maret 2017, jam 07.00)

Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar*, dalam Novianto M. Hantor, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Peraturan Daerah*, terdapat dalam situs http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9218.pdf,

Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, terdapat dalam situs: <http://www.ptpn5.com>.

Zul Fadli, "*Mungkinkah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris akan mengalami nasib serupa Majelis Pengawas Daerah diuji di Mahkamah Konstitusi?*" terdapat dalam situs : http://medianotaris.com/melawan_putusan_mk_berita384.html

